



Dana Desa dan ADD 2020 Mulai Masuk ke Kas Desa



□ Bupati Bolsel Iskandar Kamaru menyerahkan SP2D pencairan Dana Desa ke seorang Kepala Desa.

DPDR Bolmong gelar reses

Dandes...

Bolmong Selatan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten di tahun ini. Menurut Kepala Pembedayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bolmong Selatan Ekafrie Van Gobel mengatakan, saat ini sudah ada lima pemerintah desa yang sudah siap melaksanakan program APBDes 2020.

"(DD dan ADD) sudah dicairkan. Pencairan tahap pertama ini sudah ada lima desa yang sudah dapat melaksanakan program APBDes nya, yakni Milangodaa, Milangodaa Utara, Pakuku Jaya, Nunuka Raya dan Pinolantungan," ucap Ekafrie.

Dia menargetkan, proses pencairan tahap satu di akhir Februari ini sudah diterima oleh seluruh pemerintah desa. Sebab masih ada beberapa desa yang saat ini sedang menyusun

APBDes sebagai syarat pencairan.

Perlu diketahui juga, tampaknya, bahwa Kabupaten Bolmong Selatan adalah satu-satunya daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang sudah mulai mengalokasikan DD dan ADD ke rekening desa. "Bolsel pertama di Sulut yang terbitkan SP2D lewat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPP). Jumlah total yang dicairkan tahap pertama untuk lima desa Rp 1,8 miliar lebih," ucapnya.

Acara penyerahan dokumen SP2D itu sendiri secara simbolis dilakukan oleh Wakil Bupati Bolmong Selatan Dedy Abdul Hamid kepada Kepala Desa Milangodaa, di kompleks perkantoran Panango.

Percepatan pengalokasian DD dan ADD jauh hari sebelumnya sudah diingatkan oleh Bupati Bolmong Selatan Hi Iskandar Kamaru,

Bolaang Uki, KOMENTAR

Sebagai pemegang kas umum daerah, Pemda Bolmong Selatan mulai menurunkan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ke masing-masing kas pemerintah desa. Artinya, diakhir Februari ini pemerintah desa mulai dapat melaksanakan program APBDes tahun 2020.

Pengalokasian dana desa dan alokasi dana desa ke 81 desa yang ada di Kabupaten

Ikuti: Dandes... di hal 20

yakni dengan memberikan batas waktu ke setiap kepala desa untuk mempercepat penyusunan APBDes hingga akhir Februari.

Dirinya sangat berharap proses pembangunan seperti infrastruktur desa yang telah disusun oleh pemerintah desa dapat segera dilaksanakan.

Dengan dana desa juga diharapkan dapat mendorong inovasi dan kewirausahaan yang baru. Juga pemerintah mendorong agar produk lokal yang dimiliki setiap desa dapat dipasarkan secara regional hingga nasional melalui marketplace.

"Proses percepatan pencairan dana desa ini diharapkan agar pembangunan desa dapat segera terlaksana di awal tahun ini. Sehingga pemerintah desa dapat bekerja efektif dan efisien," harap Iskandar Kamaru. (fat)